

MENGATASI KETERGANTUNGAN SEKTORAL DAN GEOGRAFIS INVESTASI: STRATEGI PERCEPATAN DIVERSIFIKASI DAN PENINGKATAN PMA KOTA BONTANG

Ditujukan Kepada:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang

Penulis: Lamri

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Bontang mengalami ketergantungan investasi yang ekstrem pada satu sektor (industri kimia >90%) dan satu kecamatan (Bontang Utara 94,21%), dengan kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) <2,5%. Tanpa transformasi, guncangan eksternal pada sektor kimia akan berdampak sistemik pada PDRB, pendapatan daerah, dan ketenagakerjaan. Momentum pemulihan investasi 2025 harus dimanfaatkan untuk perubahan struktural, bukan sekadar mengulang pola lama. Solusi: (1). Insentif dual-track terdiferensiasi, (2). Satgas promosi PMA proaktif berbasis proyek ercontohan, (3). Pengembangan Zona Pertumbuhan Kedua di Bontang Selatan. Dampak: Dalam 3 tahun, target: porsi investasi non-kimia naik 20%, kontribusi PMA >10%, realisasi 2 proyek di luar Bontang Utara, kepatuhan LKPM >70%.

PENDAHULUAN

Bagaimana DPMPTSP Kota Bontang dapat mengubah struktur investasi dari ketergantungan ekstrem pada satu sektor dan satu wilayah menjadi ekonomi yang lebih beragam, berkelanjutan, dan menarik modal asing dalam waktu tiga tahun ke depan? Data realisasi investasi lima tahun terakhir menunjukkan pola boom-bust yang berbahaya. Puncak Rp4,7 triliun (2021) kemudian turun drastis, dan mulai pulih 2025. Namun pemulihan ini masih didominasi sektor kimia dan lokasi yang sama. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, Bontang akan tetap rentan terhadap guncangan eksternal. Policy brief ini disusun khusus untuk DPMPTSP sebagai leading sector dalam koordinasi transformasi iklim investasi daerah.

DESKRIPSI MASALAH

1. Ketergantungan Sektoral Ekstrem

Fakta	Sebab	Akibat
Industri kimia, barang kimia, dan farmasi menyumbang >90% realisasi investasi (Triwulan III-2025). Ini berarti dari setiap Rp100 investasi yang masuk ke Bontang, lebih dari Rp90 berasal dari satu sektor saja.	Secara historis Bontang tumbuh sebagai kota industri berbasis gas bumi sejak era 1990-an. Tidak ada kebijakan diversifikasi sistematis dalam dua dekade terakhir. Regulasi daerah justru cenderung mempermudah sektor kimia tanpa mendorong perkembangan sektor lain.	• Jika terjadi penurunan harga komoditas kimia global, PDRB Bontang bisa turun 5-10% dalam satu tahun, • Jika satu perusahaan besar melakukan rasionalisasi tenaga kerja, efek berantainya akan melumpuhkan ekonomi lokal karena tidak ada sektor lain yang cukup besar untuk menyerap. • Pendapatan asli daerah dari sektor kimia sangat fluktuatif, menyulitkan perencanaan anggaran tahunan.

2. Konsentrasi Geografis Tinggi

Fakta	Sebab	Akibat
94,21% investasi berlokasi di Bontang Utara (data TII-2025). Bontang Selatan dan Bontang Barat hanya menerima sisa kurang dari 6% investasi.	Infrastruktur penunjang (jalan, listrik, air bersih) sangat timpang. Bontang Utara memiliki jaringan jalan kelas industri, gardu listrik tegangan tinggi, dan sistem air baku yang memadai. Sementara Bontang Selatan dan Barat hanya memiliki infrastruktur kelas permukiman yang tidak mendukung kegiatan industri atau pergudangan modern.	- Ketimpangan antarwilayah semakin lebar, - Overcapacity infrastruktur di utara sementara wilayah lain kekurangan, - Rendahnya multiplier effect di wilayah lain, dan; - Muncul potensi resistensi sosial-ekonomi dari warga di luar pusat industri yang merasa tidak menikmati hasil pembangunan.

3. Minimnya Peran Penanaman Modal Asing (PMA)

Fakta	Sebab	Akibat
Kontribusi PMA <2,5% dari total realisasi investasi. Ini berarti dari Rp100 investasi yang masuk, hanya Rp2,5 yang berasal dari luar negeri. Angka ini jauh di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Timur (sekitar 15-20%).	- Promosi investasi masih bersifat pasif (menunggu investor datang sendiri) - Tidak ada proyek percontohan yang “siap jual” dalam bahasa dan standar internasional - Minimnya jaringan dengan perwakilan dagang negara target seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Belum ada layanan promosi dwibahasa yang profesional.	Kota Bontang kehilangan akses terhadap: - Teknologi hijau untuk efisiensi energi dan pengelolaan limbah. - Skema pembiayaan internasional yang lebih murah - Pasar ekspor yang lebih luas karena investor asing biasanya membawa jaringan distribusi global.

4. Rendahnya Kepatuhan Pelaporan LKPM (43,69%)

Fakta	Sebab	Akibat
Hanya 43,69% perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara rutin.	Tidak ada mekanisme sanksi bertahap yang jelas. Pendampingan pasca-perizinan sangat lemah. Banyak perusahaan tidak memahami kewajiban pelaporan atau menganggapnya tidak penting karena tidak ada konsekuensi nyata.	- Data investasi yang dimiliki DPMPTSP tidak akurat dan tidak real-time - Kebijakan menjadi tidak berbasis data mutakhir, - DPMPTSP tidak bisa memonitor kendala realisasi secara cepat, sehingga respon terhadap masalah investor sering terlambat.

ALTERNATIF SOLUSI

Alternatif	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
1  INSENTIF MASSAL TANPA SYARAT	Memberikan potongan pajak daerah dan percepatan perizinan untuk semua sektor tanpa diferensiasi	 Mudah diimplementasikan, cepat disosialisasikan, biaya administrasi rendah	 Tidak mendorong diversifikasi; hanya memperkuat status quo; berisiko tanpa dampak terukur; pemborosan anggaran insentif
2  FOKUS PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU (EKSKLUSIF)	Konsentrasi 100% anggaran dan promosi pada sektor perikanan budidaya & pengolahan hasil laut	 Memanfaatkan potensi lokal (3.609 ton budidaya laut, 2024); fokus jadi lebih tajam	 Risiko tinggi jika gagal menarik investor dalam 2 tahun; mengabaikan industri eksisting yang tetap perlu dijaga stabilitasnya; terlalu sempit
3  STRATEGI TERINTEGRASI (DUAL-TRACK + ZONA PERTUMBUHAN KEDUA + SATGAS PMA)	Kombinasi insentif terdiferensiasi, pengembangan infrastruktur di Bontang Selatan, dan promosi proaktif ke negara target	 Mengatasi tiga akar masalah sekaligus; berbasis bukti; ada target terukur; menjaga stabilitas eksisting; diversifikasi bertahap	 Membutuhkan koordinasi lintas dinas intensif; waktu persiapan 6–12 bulan; perlu perubahan regulasi daerah (Perwal)

Berdasarkan analisis di atas, transformasi iklim investasi Bontang memerlukan pendekatan yang berani, terarah, dan kolaboratif. Secara garis rekomendasi kebijakan inti yang dirancang untuk menciptakan lompatan tersebut adalah Strategi Terintegrasi, yang menghasilkan beberapa alternatif :

- Mengatasi akar masalah (ketergantungan sektoral dan geografis) secara simultan;
- Mempertahankan stabilitas industri eksisting sembari membuka sektor baru secara bertahap;
- Memiliki efek jangka panjang dengan menciptakan pusat ekonomi baru dan rantai nilai baru;
- Terukur dan dapat dievaluasi melalui KPI yang jelas, sehingga akuntabel ke pimpinan daerah;
- Risiko moderat namun tertangani dengan pembentukan Satgas dan studi kelayakan;
- Efisiensi anggaran karena insentif hanya diberikan jika persyaratan terpenuhi (performance-based).

Asumsi Kebijakan

- APBD Kota Bontang tahun 2026-2027 memungkinkan alokasi untuk infrastruktur dasar di Bontang Selatan minimal Rp10 miliar.
- Terdapat komitmen politik dari Walikota dan DPRD untuk mengubah Perda tentang insentif daerah.
- Dunia usaha (termasuk perusahaan kimia eksisting) bersedia berdialog dalam forum kemitraan.

Risiko Implementasi dan Mitigasi

RISIKO	MITIGASI
 Perusahaan kimia menolak syarat insentif	 Jadikan insentif sebagai bonus, bukan pemotongan fasilitas yang sudah ada. Awali dengan sosialisasi 3 bulan.
 Investor asing tetap tidak tertarik meski ada Satgas	 Gunakan jasa konsultan promosi investasi profesional untuk tahun pertama.
 Pembangunan infrastruktur Bontang Selatan molor	 Tetapkan tegang waktu dalam Perwal dan libatkan langsung Dinas PUPR dalam rapat bulanan Satgas.
 Kepatuhan LKPM tidak naik	 Terapkan sanksi administratif bertahap (teguran tertulis → pembekuan izin sementara → pencabutan) dan sediakan helpdesk LKPM khusus.

REKOMENDASI TERPERINCI

1. Menerapkan Insentif Dual-Track (Berlaku mulai Q1-2026)

Jalur 1, Industri kimia eksisting: Insentif (potongan pajak daerah maksimal 30% & percepatan perizinan) diberikan hanya jika perusahaan memenuhi minimal satu dari dua syarat:

- Membangun fasilitas pengolahan limbah menjadi energi atau bahan baku sekunder (investasi minimal Rp5 miliar).

- Membentuk kemitraan hilirisasi dengan minimal 3 UMKM lokal yang terdaftar di DKUMPP.

Jalur 2, Sektor prioritas baru: Sektor sasaran: ekonomi biru (cold chain, pengolahan ikan), agroindustri (VCO, olahan kelapa), logistik spesialis (pergudangan modern). Insentif yang diberikan:

- Pembebasan pajak daerah 100% selama 3 tahun pertama bagi investasi minimal Rp2 miliar.
- Layanan perizinan satu hari (dengan kelengkapan dokumen dasar).
- Pendampingan teknis dari DPMPTSP selama 6 bulan pertama.

2. Menjalankan Program “Bontang Global Partnership”

- Pembentukan Satgas Promosi Investasi (SK Walikota, target Maret 2026): Keanggotaan: DPMPTSP (ketua), DKUMPP, Bapperida, dan perwakilan asosiasi industri Bontang. Tugas: (a) menyusun profil investasi dwibahasa (Indonesia-Inggris), (b) membangun kontak dengan perwakilan dagang Singapura, Jepang, Korea Selatan, (c) melakukan targeted roadshow minimal 2 kali di tahun 2026.
- Penyiapan proyek percontohan “siap jual” (selesai Q2-2026): DPMPTSP bersama Bapperida menyiapkan minimal 2 proposal proyek lengkap meliputi: Kajian kelayakan awal (pra-feasibility study), Peta ketersediaan lahan, Perkiraan ROI (Return on Investment) minimal 12%, Rekomendasi skema pembiayaan (pemerintah, swasta, atau campuran). Contoh konkret: Kawasan akuakultur terintegrasi di Bontang Selatan (luas 10 hektar, nilai investasi ditaksir Rp50 miliar) dan proyek co-processing limbah industri menjadi energi (kemitraan dengan perusahaan kimia eksisting).

3. Mempersiapkan Zona Pertumbuhan Kedua di Bontang Selatan

Tenggat waktu tegas:

- Q2-2026: Finalisasi AMDAL dan perencanaan teknis kawasan (DPMPTSP berkoordinasi dengan Dinas PUPR, Perumahan, dan Bapperida).
- APBD 2027: Alokasi anggaran minimal Rp10 miliar untuk pembangunan jalan poros sepanjang 3 km, perluasan jaringan listrik tegangan menengah, dan sistem air bersih kapasitas 50 liter/detik.

Insentif tambahan: Investor pertama yang membangun minimal 1 hektar lahan produktif di zona tersebut mendapatkan tambahan keringanan retribusi daerah 50% selama 2 tahun di luar insentif dual-track.

Rencana Implementasi dan Pengawasan

Agar rekomendasi tidak hanya berhenti di atas kertas, diperlukan skema koordinasi dan pengawasan yang jelas. DPMPTSP ditunjuk sebagai leading sector yang mengoordinasikan seluruh proses. Kolaborasi dengan dinas teknis lain menjadi kunci: Dinas PUPR untuk penyediaan infrastruktur dasar, DKUMPP untuk promosi dan kemitraan usaha, Dinas Perumahan dan Permukiman untuk penyiapan lahan dan kesesuaian tata ruang, serta Bapperida untuk integrasi perencanaan dan evaluasi dampak kebijakan. Pada tahun pertama implementasi, fokus dapat diberikan pada tiga kegiatan prioritas: (1) penyusunan dan pengesahan regulasi tentang paket insentif dual-track, (2) pembentukan Satgas Promosi Investasi dan pelaksanaan roadshow perdana, serta (3) finalisasi detail perencanaan untuk Zona Pertumbuhan Kedua di Bontang Selatan. Keberhasilan strategi ini perlu diukur dengan indikator yang tepat. Indikator kunci (Key Performance Indicators) yang dapat digunakan antara lain: peningkatan porsi investasi sektor non-kimia sebesar 20% dalam dua tahun, pencapaian kontribusi PMA lebih dari 10% dalam tiga tahun, realisasi minimal dua proyek investasi menengah di luar Bontang Utara dalam dua tahun, serta peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan LKPM di atas 70%.

KESIMPULAN

Perjalanan menuju struktur investasi yang beragam dan tangguh memang penuh tantangan, tetapi bukan mustahil. Kota Bontang memiliki semua bahan dasar yang diperlukan: kekuatan industri yang mapan, potensi alam yang melimpah, dan momentum pemulihan. Yang dibutuhkan sekarang adalah visi yang berani untuk bertransformasi dan konsistensi dalam eksekusi.

Dengan menerapkan rekomendasi yang mengedepankan diversifikasi cerdas, pendekatan global yang proaktif, dan pemerataan wilayah, Bontang tidak hanya akan mengamalkan fondasi ekonominya tetapi juga membuka ceruk-ceruk pertumbuhan baru yang berkelanjutan. Komitmen kolektif dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan dari stakeholder merupakan faktor penentu kesuksesan strategi jangka panjang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapperida Kota Bontang. (2024). Profil Investasi Kota Bontang 2024. Bontang: Pemerintah Kota Bontang.
- DPMPTSP Kota Bontang. (2025). Laporan Realisasi Investasi Triwulan III-2025 Bontang: DPMPTSP.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Biru di Kawasan Timur Indonesia. Jakarta: Kemenko Marves.
- Pemerintah Kota Bontang. (2022). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang 2022-2042 Perda Kota Bontang No. 7 Tahun 2022).
- World Bank. (2024). Indonesia Economic Prospects: Diversifying Subnational Economies. Jakarta: World Bank Office.